



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 - 2021**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2020**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2005-2025 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

Pasal 2

- (1) RPJPD Semesta Berencana merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- (2) RPJMD Semesta Berencana merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana, RTRW dan RPJMN.

BAB III

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2016-2021.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Semesta Berencana dan bersifat indikatif.

- (3) Susunan dan Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Semesta Berencana.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Semesta Berencana.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung melakukan verifikasi untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Badung Nomor 2009/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- b. Keputusan Bupati Badung Nomor 5763/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Januari 2020


BUPATI BADUNG,
NI NOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 NOMOR 7

A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 2021:

1. Renstra Inspektorat Kabupaten Badung.
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
3. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
4. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
5. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
6. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.
7. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
8. Renstra Badan Pendapatan / Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
9. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.
10. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
11. Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung.
12. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
13. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
14. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Badung.
15. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Badung.
16. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.
17. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
18. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung.
19. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
20. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
21. Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
22. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
23. Renstra Dinas Koperasi, UMK dan Perdagangan Kabupaten Badung.
24. Renstra Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Badung.
25. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
26. Renstra Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
27. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
28. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
29. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Badung.
30. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.
31. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
32. Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.
33. Renstra Kecamatan Petang Kabupaten Badung.
34. Renstra Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
35. Renstra Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
36. Renstra Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
37. Renstra Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.
38. Renstra Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.



A

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA	4
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda	4
2.2 Sumber Daya Bappeda	10
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda.....	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA	16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	16
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	17
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali	17
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	18
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
BAB VIII PENUTUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib menyusun Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Bappeda untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Bappeda.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Bappeda Kabupaten Badung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Bappeda
- Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappeda
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
- Bab V : Strategi dan Arah kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Bappeda Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Bappeda Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :

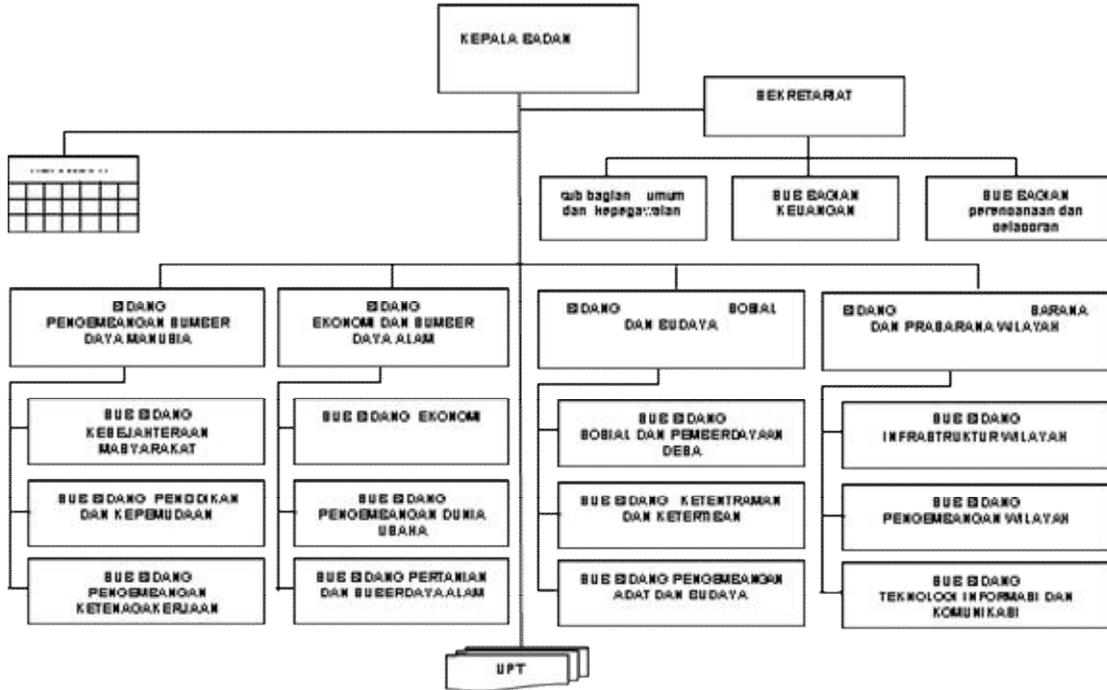
- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan susunan organisasi Bappeda Kabupaten Badung terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Kepemudaan;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan;
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - c. Sub Bidang Pertanian Dan Sumber daya Alam;
- e. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sosial dan Pemberdayaan Desa;
 - b. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Adat dan Budaya;
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - c. Sub Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi;

- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Bappeda Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Badan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana kerja Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang– undangan;
- 2) Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- 5) Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektoral;
- 6) Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja termasuk program dari pemerintah atasan;
- 7) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- 8) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - 9) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang-bidang sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - 10) Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian targettarget kinerja program;
 - 11) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Sekretariat mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana kerja Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan;
 - 2) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, barang milik daerah dan pelaporan;
 - 3) Mengkoordinasikan penyiapan materi dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - 4) Mengkoordinasikan penyiapan materi dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan Badan;
 - 6) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - 8) Mengkoordinasikan penyiapan laporan materi evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
- 1) Menyusun program kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pendidikan, pemuda olah raga, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, kepegawaian dan sekretariat daerah;

- 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
 - 10) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 11) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
 - 13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :
- 1) Menyusun program kerja Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, keuangan, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, perikanan dan energi sumber daya mineral;
 - 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
 - 10) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 11) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
 - 13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- e. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas :
- 1) Menyusun program kerja Bidang Sosial Dan Budaya;
 - 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
 - 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;

- 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
 - 10) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 11) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
 - 13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :
- 1) Menyusun program kerja Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah;
 - 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
 - 10) Mengoordinasikan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);

- 11) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 12) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
- 13) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja dan program;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Bappeda

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat perencana yang berkualitas secara memadai. Pada Tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Bappeda.

Tabel 2.1
Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Badung

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jumlah	
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	SARMUD	DIPLOMA	SMA	SMP		SD
1	Kepala Bappeda		1			1				1							1
2	Sekretaris Bappeda			1		1				1							1
	a Kasubag. Umum dan Kepegawaian				1					1							1
	b Kasubag. Keuangan				1						1						1
	c Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan				1						1						1
	d Staf				1	22	5	1	5	15		1	9	2	1		29
3	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia			1		1				1							1
	a Kasubid. Kesejahteraan Masyarakat				1					1							1
	b Kasubid. Pendidikan dan Kepemudaan				1					1							1
	c Kasubid. Pengembangan Ketenagakerjaan				1	1				1							1
	d Staf				1	10			3	8							11
4	Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam			1			1			1							1
	a Kasubid Ekonomi				1					1							1
	b Kasubid Pengembangan Dunia Usaha				1	1				1							1
	c Pertanian Dan Suberdaya Alam				1		1			1							1
	d Staf						8		2	5							8
5	Kabid Sosial dan Budaya			1		1				1							1
	a Kasubid. Sosial dan Pemberdayaan Desa				1		1			1							1
	b Kasubid. Ketentraman dan Ketertiban				1		1			1							1
	c Kasubid. Pengembangan Adat dan Budaya				1		1			1							1
	d Staf						8	2	3	5			2				10
6	Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah			1		1				1							1
	a Kasubid. Infrastruktur Wilayah				1		1			1							1
	b Kasubid. Pengembangan Wilayah				1		1			1							1
	c Kasubid. Teknologi Informasi Dan Komunikasi				1	1				1							1
	d Staf						7	1	3	4				1			8
	Jumlah	0	1	5	15	11	67	8	1	33	41	0	1	12	2	1	87

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Bappeda telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Bappeda ditampilkan pada Tabel 2.2 dibawah ini

Tabel 2.2

Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Kabupaten Badung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Mobil Station Wagon	9	X		
2	Sepeda Motor	31	X		
3	Global Positioning System	5	X		
4	Scanner	2	X		
5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	X		
6	Mesin Ketik Elektronik	1	X		
7	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	X		
8	Lemari Besi	2	X		
9	Rak Kayu	16	X		
10	Filling Besi/Metal	6	X		
11	Band Kas	5	X		
12	Lemari kayu	11	X		
13	Alat Penghancur Kertas	4	X		
14	Papan Nama Instansi	1	X		
15	Papan Pengumuman	4	X		
16	White Board	1	X		
17	Mesin Absensi	1	X		
18	Overhead Projektor	1	X		
19	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4	X		
20	Lemari Kayu	3	X		
21	Rak Kayu	12	X		
22	Meja Kayu/Rotan	6	X		
23	Meja Rapat	58	X		
24	Meja Telpon	1	X		
25	Meja Podium	1	X		
26	Kursi Rapat	49	X		
27	Kursi Putar	44	X		
28	Meja Komputer	4	X		
29	Meja Piket	1	X		
30	Sofa	1	X		
31	Lemari Pakaian	4	X		
32	Lemari Rias	1	X		
33	MOUBILER LAINNYA	13	X		
34	Jam Elektronik	2	X		
35	Alat Pembersih Lain-lain	2	X		
36	AC Split	3	X		
37	Alat Dapur Lain-lain	1	X		
38	Televisi	11	X		
39	Sound System	4	X		
40	Wireless	1	X		
41	Unit Power Supply	2	X		
42	Camera Video	1	X		
43	Camera Film	11	X		
44	Dispenser	6	X		
45	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	X		
46	Local Area Network (LAN)	1	X		
47	P.C Unit	50	X		
48	Lap Top	29	X		
49	Note Book	34	X		

50	Storage Modul Disk	1	X		
51	Monitor	9	X		
52	Printer	55	X		
53	Scanner	1	X		
54	External	9	X		
55	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	5	X		
56	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	X		
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	X		
58	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	X		
59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18	X		
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	X		
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	X		
62	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	X		
63	Buffet Kayu	1	X		
64	Proyektor + Attachment	14	X		
65	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	X		
66	Camera Film	3	X		
67	Vertical Motorized Flim Rewinder	4	X		
68	Mesin Jilid	8	X		
69	Telephone (PABX)	1	X		
70	Pesawat Telephone	2	X		
71	Facsimile	3	X		
72	Personal Komputer	1	X		

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka selama kurun waktu Tahun 2005-2016 Bappeda Kabupaten Badung telah dapat menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain, yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006-2010;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang disusun setiap tahun.

Disamping itu pula sebagai Perangkat Daerah, Bappeda Kabupaten Badung telah pula menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan SKPD sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2006-2010;
- b. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
- c. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- d. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Badung yang disusun setiap tahun.

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Badung serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 berikut ini.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kabupaten Badung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Perencanaan Pembangunan																		
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	-	-	-	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Badung

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	17.379.372	21.470.905	20.615.144	20.066.011	23.950.236	14.535.993	17.294.202	17.998.356	18.061.035	20.199.351	83,64	80,55	87,31	90,01	84,34	1.642.716	5.663.359
Belanja Aparatur	12.963.656	12.969.856	13.910.757	13.402.710	15.472.544	10.150.067	10.150.067	12.210.726	12.548.509	13.235.190	78,30	78,26	87,78	93,63	85,54	627.222	3.085.123
Belanja Tidak Langsung	9.541.168	11.612.818	12.019.346	12.343.570	14.591.658	7.955.903	8.930.910	10.548.106	11.655.930	12.506.898	83,38	76,91	87,76	94,43	85,71	1.262.622	4.550.995
Belanja Langsung	7.838.204	9.858.087	8.595.799	7.722.441	9.358.579	6.580.090	8.363.292	7.450.250	6.405.105	7.692.454	83,95	84,84	86,67	82,94	82,20	380.094	1.112.364
Total Belanja Daerah	17.379.372	21.470.905	20.615.144	20.066.011	23.950.236	14.535.993	17.294.202	17.998.356	18.061.035	20.199.351	83,64	80,55	87,31	90,01	84,34	1.642.716	5.663.359

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Keberhasilan Bappeda Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholders* baik itu SKPD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan.

Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Badung masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Badung yaitu :

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
- b. Pengembangan pembiayaan pembangunan daerah yang tidak lagi bertumpu pada pemerintah melainkan adanya kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
- c. Peningkatan kualitas SDM perencana yang mampu dan cepat, baik dalam pengelolaan pembangunan maupun dukungan perangkat jaringan informasi pembangunan yang memadai.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Adanya *trend* peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun akan semakin meningkat pula ketersediaan dana pembangunan daerah.
- b. Dengan adanya pengembangan desentralisasi pembangunan mengakibatkan terjadinya pergeseran kegiatan pembangunan ke daerah, sehingga segala aktivitas perencanaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pengendalian kegiatan pembangunan dialihkan ke daerah.
- c. Semakin intensifnya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM perencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2009 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Badung dari wilayah Kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung maka Bappeda sebagai institusi perencana dituntut untuk dapat segera menjabarkan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Badung. Perencanaan awal yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Badung.

Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan Bappeda memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Bappeda Kabupaten Badung.

Permasalahan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Masalah internal yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Badung antara lain :

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang perencanaan.
2. Belum sempurnanya basis data pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan tahun berikutnya.
3. Belum maksimalnya penelitian dan pengembangan yang dapat menunjang perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung.

Masalah eksternal yang dihadapi Bappeda Kabupaten Badung adalah :

1. Belum optimalnya perencanaan yang bersifat partisipatif dimana idealnya proses perencanaan yang baik sangat memerlukan keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Belum optimalnya sistem koordinasi perencanaan dengan sektor di Provinsi, Kabupaten/Kota dan swasta serta masyarakat.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Peningkatan kualitas perencanaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan SDM perencanaan, pemantapan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana* Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan hasil KLHS, maka dapat diidentifikasi beberapa program/kegiatan prioritas yang berdampak lingkungan :

- a. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura;
- c. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa;
- d. Mendorong pengembangan Agropolitan Petang;
- e. Pembangunan jalan bebas hambatan;
- f. Pengembangan dan pembangunan terminal;
- g. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet;
- h. Pengembangan pengelolaan limbah domestic terpadu;
- i. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;

- j. Pengembangan kawasan pariwisata;
- k. Pengembangan kawasan pertanian modern;
- l. Pengembangan kawasan industri; dan
- m. Pengembangan kawasan perikanan.

Adapun maksud dilaksanakannya tahapan pengkajian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dan negatif terhadap indikasi program prioritas dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Demikian juga terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Analisis dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Kajian pengaruh dilakukan dengan memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan memberikan penilaian pengaruh negatif atau positif lalu mendeskripsikan pengaruh tersebut. Selanjutnya menganalisis pengaruh kumulatif dengan disertai usulan adaptasi/mitigasi.

Tabel 3.4.1 Identifikasi Program Prioritas

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Program Prioritas	Pencemaran Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/hutan	Permasalahan Sampah	Degradasi Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	1	0	1	0	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	1	1	1	0	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	1	0	1	1	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Program Prioritas	Pencemaran Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/hutan	Permasalahan Sampah	Degradasi Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
4. Pengembangan Agropolitan Petang	0	1	1	0	1. Pembangunan terminal 2. Pembangunan Pasar
5. Pembangunan jalan bebas hambatan	0	1	0	0	1. Pengembangan kawasan
6. Pengembangan dan pembangunan terminal	0	1	0	0	1. Pembangunan jalan 2. Pengembangan kawasan
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	1	0	0	1	1. Pengembangan kawasan
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	1	0	0	1	1. Pengembangan pelayanan sanitasi perkotaan
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	1	1	1	0	1. Perluasan permukiman 2. Pembangunan jalan
10. Pengembangan kawasan pariwisata	1	0	1	1	1. Pembangunan jalan 2. Pembangunan akomodasi wisata
11. Pengembangan kawasan pertanian modern	1	1	0	0	1. Pembangunan jalan 2. Pengembangan pasar
12. Pengembangan kawasan industri kerajinan rakyat dan UMKM	1	1	1	0	1. Pengembangan permukiman 2. Pembangunan jalan
13. Pengembangan kawasan perikanan	1	0	1	1	1. Pengembangan pasar ikan

Berdasarkan analisis pengaruh kumulatif diatas, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap masing-masing program prioritas yang dikaitkan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan serta mendeskripsikannya sesuai dengan nilai yang diberikan. Adapun hasil penilaian dan pendeskripsian tersebut dituangkan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.4.2 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai-	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	-	Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan	-	Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan	+	Peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk	+	Peningkatan akses dan aktivitas di kawasan pantai
2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	-	Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	0	Kemungkinan tidak berpengaruh
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata
4. Pengembangan Agropolitan Petang	-	Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah	+	Penataan kawasan dengan payung hukum dan sarana /prasarana	+	Penataan kawasan	0	Tidak berdampak penting
5. Pembangunan jalan bebas hambatan	0	Tidak berdampak penting	-	Alih fungsi lahan/penggunaan lahan produktif	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
6. pengembangan dan pembangunan terminal	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	+	Alih fungsi lahan disekitarnya	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	0	Tidak berdampak penting
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	++	Penataan DAS mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	+	Menghindari alih fungsi DAS	+	Penataan DAS mengurangi pembuangan sampah ke sungai	+	Penataan DAS mengurangi masuknya limbah dan sampah ke pantai
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	++	Pengolahan terpadu mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	0	Tidak berdampak penting	+	Tidak berdampak penting	++	Pengolahan terpadu mencegah pencemaran air laut
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	0	Limbah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	-	Alih fungsi lahan disekitar kawasan	0	Sampah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	0	Tidak berdampak penting
10. Pengembangan kawasan pariwisata	0	Air limbah dari akomodasi wisata	+	Penataan kawasan pariwisata	0	Sampah dari aktivitas pariwisata	0	Ancaman sepadan dan ekosistem pantai
11. pengembangan kawasan pertanian modern	--	Pencemaran air karena penggunaan bahan kimia	+	Penataan kawasan dengan payung hukum dan sapras yang layak	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting

Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai-	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
12. pengembangan kawasan industri kerajinan dan UMKM	--	Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan	0	Alih fungsi lahan produktif dan pengembangan kawasan permukiman	--	Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri	0	Penurunan kualitas air laut disekitar-nya
13. Pengembangan kawasan perikanan	--	Air limbah dari pasar dan pengolahan ikan	0	Tidak berdampak penting	-	Sampah dari aktivitas pasar ikan	--	Tekanan ekoistem pantai dari padatnya aktivitas perikanan

Disamping itu pula dilakukan diidentifikasi perkiraan pengaruh khususnya dampak negatif suatu program prioritas terhadap suatu isu pembangunan berkelanjutan serta diuraikan mitigasi yang dapat dilakukan. Analisis dampak tersebut dituangkan kedalam Tabel berikut :

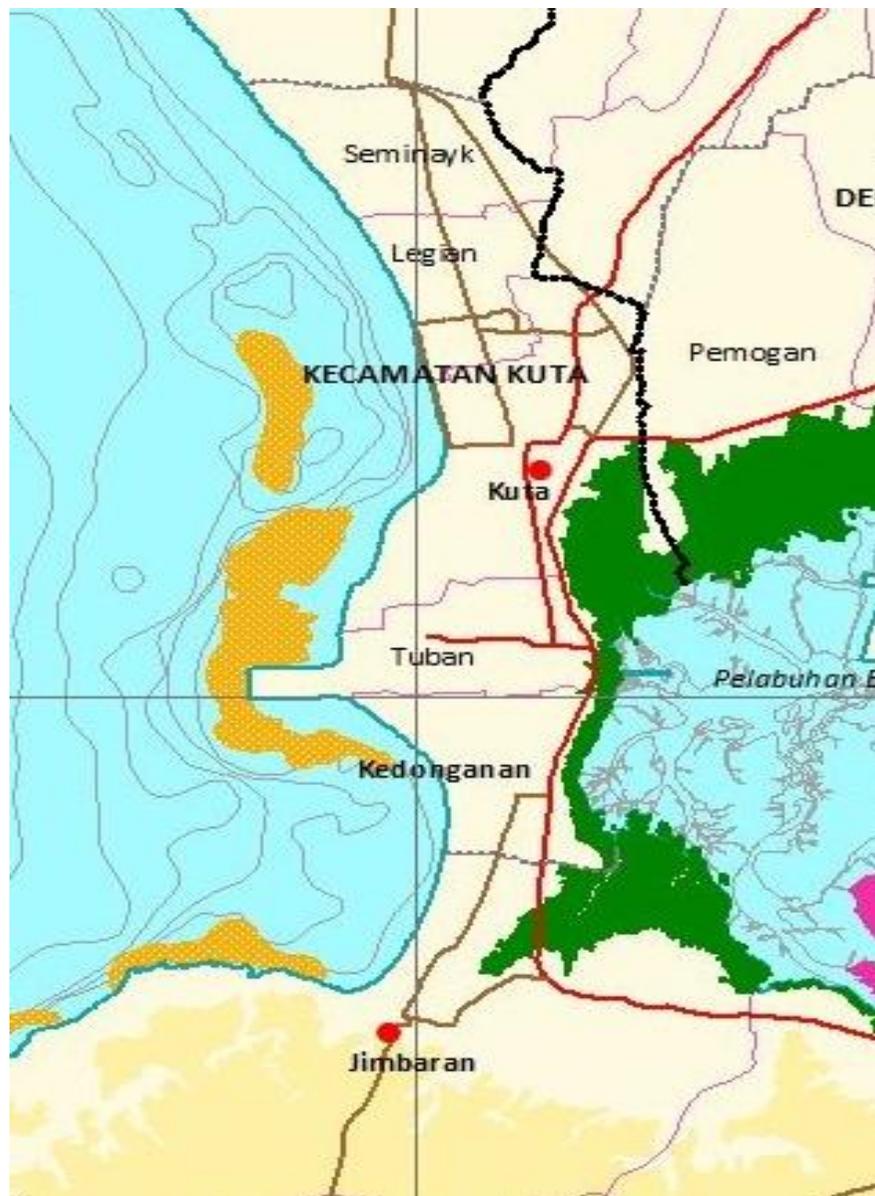
Tabel 3.4.3 Analisis Pengaruh Negatif Program 1

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai		
Deskripsi Baseline : Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang masuk ke sistem perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam pendangkalan dan pencemaran. 2. Penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur serta pengembangan permukiman 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama terjadinya gangguan dari kegiatan, dapat terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah domestik terpadu dan penerapan standar pengolahan limbah kegiatan usaha tertentu

Pengaruh kumulatif

1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan terus memperburuk sanitasi kawasan, estetika yang kumuh serta terancam kepunahan biota laut.
2. Dampak positif berupa peningkatan akses dan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada nelayan, dan generasi penerus karena kerusakan lingkungan yang parah.

Gambar 3.4.1 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya



Tabel 3.4.4 Analisis Pengaruh Negatif Program 2

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan. 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan Kuta Utara dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kualitas ruang terbuka hijau. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan penetapan presentasi ruang terbuka hijau dan peningkatan kualitasnya.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan presentase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir. 4. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir. sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk. 		

Tabel 3.4.5 Analisis Pengaruh Negatif Program 3

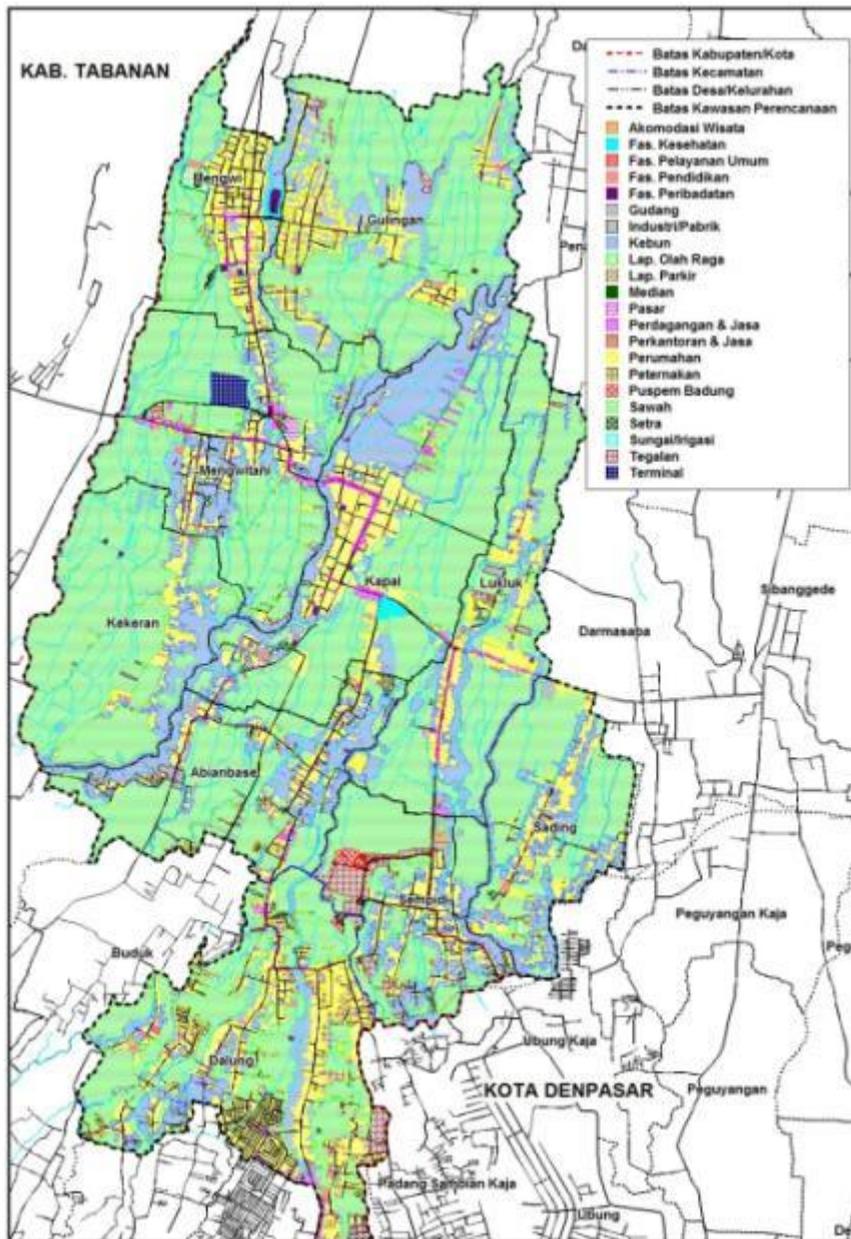
Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah pertanian dan resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi RTH.

	4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan kualitas ruang terbuka hijau.	
--	--	--

Pengaruh kumulatif

1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pusat pemerintahan dan perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan daerah pertanian abadi, presentase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir.
2. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir serta tetap terjaga produksi pertanian. sementara dampak negative selain masyarakat Mengwidan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk.

Gambar 3.4.2 Posisi Strategis Kabupaten Badung sebagai peluang dan ancaman lingkungan



Tabel 3.4.6 Analisis Pengaruh Negatif Program 4

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai		
Deskripsi Baseline : Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang mengandung residu pupuk kimia dan pestisida mencemari system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah dampak akumulasi menimbulkan kepunahan biota dan gangguan kesehatan manusia. 2. Penyebabnya adalah pola pertanian intensif yang menggunakan bahan kimia secara luas. 3. Lokasinya di wilayah Kecamatan Petang kearah hilir 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada upaya control dan pola tanam yang ramah lingkungan terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus diterapkan pola tanam yang ramah lingkungan.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta agropolitan yang mampu menjaga produksi pertanian dan peningkatan ekonomi wilayah/perdesaan dengan tidak merusak sumberdaya lahan dan air. Namun kemungkinan terburuk adalah kawasan agropolitan menjadi sumber pencemaran air dan ancaman lingkungan dan manusia yang terkena dampak. 2. Dampak positif berupa peningkatan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative timbulnya pencemaran air yang mengancam wilayah di hilir. 		

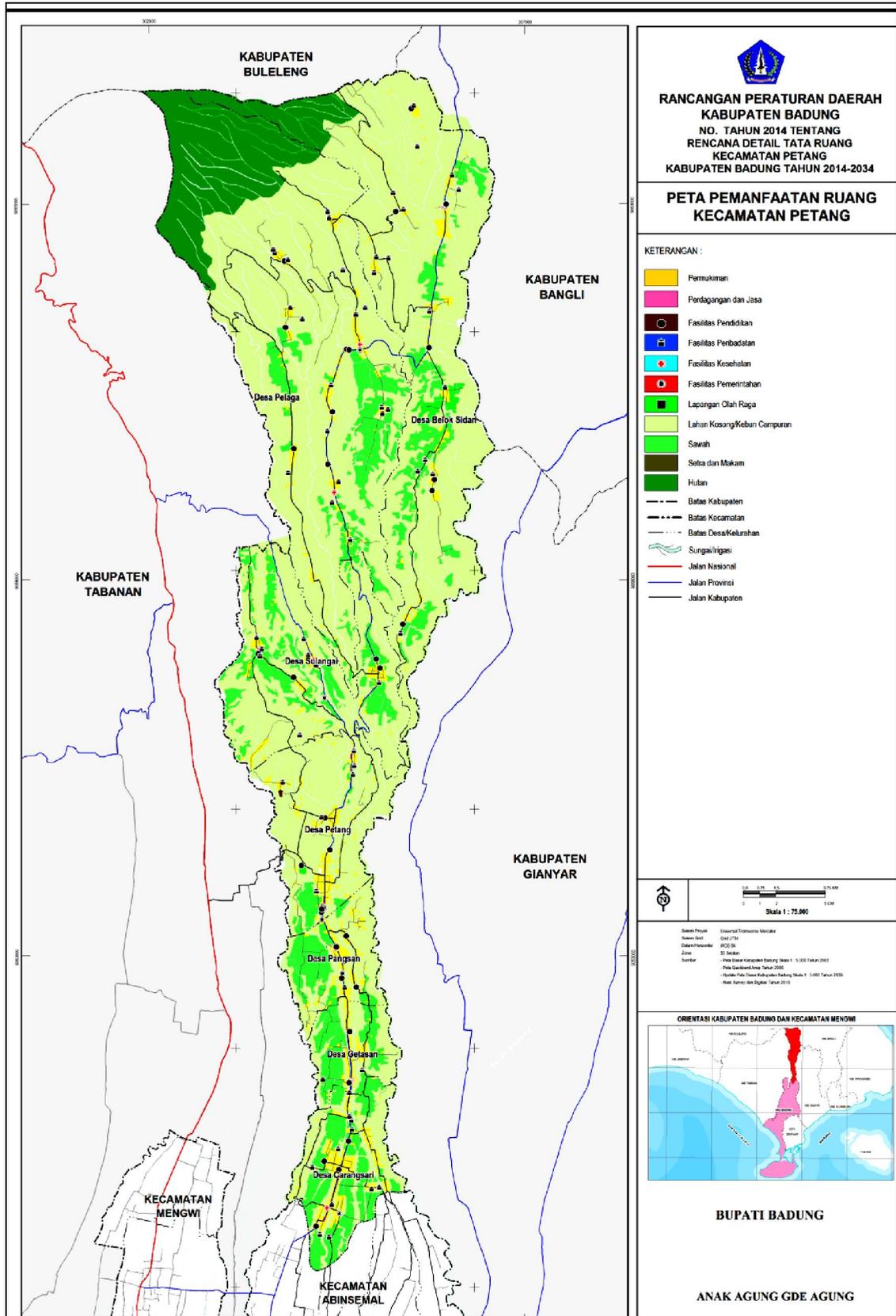
Tabel 3.4.7 Analisis Pengaruh Negatif Program 5

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pembangunan jalan bebas hambatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan lahan pertanian sebagai jalan, pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembangan permukiman, pusat perdagangan baru di sekitar jalan sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. Lokasi rencana jalan bebas hambatan Kuta- Tanah Lot- Soka, , Cangu - Mengwi, lingkaran Mengwi , Batuan -Purnama dan jalan primer arteri di pusat perkotaan Mangupura wilayah dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan penutupan ruas tertentu dari akses jalan. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di Kabupaten Badung maupun antar kabupaten. Kawasan pertanian dan resapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah-daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 4. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya tidak dilalui jalan, peningkatan perekonomian dengan dibuka akses jalur pariwisata, penjualan produk pertanian serta arus keluar masuk logistik dan berkembangnya daerah/pusat perdagangan baru khususnya di Sarbagita, pusat pemerintahan kabupaten dan Badung utara. Terjaga ruang terbuka hijau dan lahan produktif. sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan. 		

Tabel 3.4.8 Analisis Pengaruh Negatif Program 6

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Perkembangan pusat perdagangan dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa berdampak secara langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembangan permukiman dan kawasan kepadatan baru dan sekitarnya sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. lokasinya di Badung Selatan (Jimbaran, Kedonganan, uluatu), Mengwi dan sekitarnya. 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kawasan pertanian abadi dan penataan kawasan. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pemerataan perekonomian dengan akses yang cepat dan lengkap di seluruh Kabupaten Badung daerah pertanian dan reapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah munculnya pusat-pusat kepadatan dan kemacetan baru, menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 2. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat pemerataan akan akses perdagangan dan jasa, peningkatan perekonomian dengan dibuka pusat-pusat perdagangan dan jasa baru.Sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan. 		

Gambar 3.4.3 Potensi Agribisnis Petang sekaligus daerah resapan



Tabel 3.4.9 Analisis Pengaruh Negatif Program 7

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai		
Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah limbah yang masuk ke system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam kesehatan dan lingkungan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industry yang intensif menggunakan bahan kimia dengan limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengolahan limbah yang efektif memenuhi baku mutu yang ditentukan. dapat terjadi pemulihan, jika limbah yang dibuang memenuhi baku mutu /tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah industri yang memenuhi baku mutu yang ditentukan.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industri yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industry yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. 2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industry tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya. 		

Tabel 3.4.10 Analisis Pengaruh Negatif Program 8

Isu Pembangunan Berkelanjutan :		
Masalah Sampah		
Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industry		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan industri kecil dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah padat yang dihasilkan industri memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik menimbulkan pencemaran lingkungan perairan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industri yang intensif menggunakan berbagai bahan baku dengan sampah limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah padat yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah padat industri yang efektif.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industry yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industri yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah padat. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah padat akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. 		

2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industri tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya.

Tabel 3.4.11 Analisis Pengaruh Negatif Program 9

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran air dan Masalah Sampah		
Besarnya limbah cair dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas/pasar ikan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai 2. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Kedonaganan dan Mengwi. 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran pantai dan estetikan kawasan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah cair perikanan (pasar ikan).

Pengaruh kumulatif
<p>3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan kawasan perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan ikan dan ekspor hasil perikanan. Infrastruktur pasar ikan yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah cair. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah cair akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran pantai, dampak buruk bagi pariwisata daerah sekitarnya, gangguan kesehatan dan lingkungan.</p> <p>4. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil dari aktivitas perikanan(pasar ikan), dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam ekosistem pantai, gangguan kesehatan dan kawasan pariwisata sekitarnya.</p>

4.3.2 Integrasi Rekomendasi KLHS kedalam Program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021

Upaya pengembangan mitigasi /adaptasi dan/atau alternatif adalah untuk meningkatkan kualitas program RPJMD Semesta Berencana dalam menunjang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Badung dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Usulan-usulan tambahan kebijakan/rencana/program untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi sebagai dampak program. Alternatif adalah usulan-usulan pengganti kebijakan /rencana /program untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul.

Pokja melakukan kegiatan ini dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk narasumber dan para pakar serta dengan tim penyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut berupa *Focussed Group Disscation* (FGD), *workshop*, panel ataupun forum lain yang dianggap perlu untuk dilakukan. Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4.12 Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau 3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut). 4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/dayaampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif 3. Mendorong kepatuhan/ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan 4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. penetapan ruang terbuka hijau
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah. 2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan 4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sawah abadi. 2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas 3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha 4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1.integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/ limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
3	Pengembangan Agropolitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap alih fungsi lahan 2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air 3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi. 4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas 2. Penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan). 3. penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. 4. integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat 2. Pengembangan pertanian organik
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Menutup/mbatasi akses percabangan jalan TOL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.
5	Pengembangan Kawasan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya. 3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan kawasan industri khusus

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya.	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai. 2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. Pembangunan infrastruktur; jalan dan areal parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius ruang kawasan dengan daerah wisata terdekat	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus

4.3.2 Rumusan Integrasi Kedalam Rekomendasi

Tim penyusun KLHS berkoordinasi dengan tim perumus program dalam SKPD menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan upaya mitigasi dan atau alternative yang telah disusun sebelumnya. Adapun pengintegrasian kedalam rumusan rekomendasi ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.4.13
Perumusan Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2016 - 2021
Kabupaten Badung

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau	1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/ daya tampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif	1. Pembatasan/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. penetapan ruang terbuka hijau	Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari metropolitan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		<p>3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut).</p> <p>4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta</p>	<p>3. Mendorong kepatuhan/ke taatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan</p> <p>4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama</p>		
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah.</p> <p>2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas.</p> <p>3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan</p> <p>4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah</p>	<p>1. Penetapan sawah abadi.</p> <p>2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas</p> <p>3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha</p> <p>4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah</p>	<p>1. integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan</p>	<p>Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan system sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.</p>
3	Pengembangan Agropolitan	<p>1. Dampak terhadap alih fungsi lahan</p> <p>2. Dampak terhadap</p>	<p>1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas</p> <p>2. penerapan</p>	<p>1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona</p>	<p>Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan</p>

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		<p>pemanfaatan berlebihan sumber daya air</p> <p>3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi</p> <p>4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif</p>	<p>teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan).</p> <p>3.penerapan sistem pertanian ramah lingkungan.</p> <p>4.integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani</p>	<p>mata pencaharian masyarakat setempat</p> <p>2.pengembangan pertanian organik</p>	<p>iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.</p>
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah</p> <p>2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.</p> <p>3. Dampak terhadap gangguan sistem subak</p>	<p>1.Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran</p> <p>2.menutup/membatasi akses percabangan jalan TOL.</p>	<p>1.Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.</p>	<p>Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung</p>
5	Pengembangan Kawasan Industri	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah</p> <p>2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.</p>	<p>1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran</p> <p>2.Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya.</p>	<p>1.penetapan kawasan industri khusus</p>	<p>Penetapan kawasan industry khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan</p>

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan	3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat.		kepentingan lingkungan dan kehidupan social-masyarakat setempat
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya.	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai. 2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. Pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius kawasan daerah wisata terdekat	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus	Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

REKOMENDASI

1. Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya.
2. Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan sistem sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.
3. Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.
4. Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta- Tanah Lot-Soka serta Mengwi-Batuan- Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5. Penetapan kawasan industri khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan sosial-masyarakat setempat
6. Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan dan merespon terhadap dinamika lingkungan strategis eksternal dan internal baik di tingkat regional, nasional maupun global. Lingkungan strategis tersebut menjadi salah satu aspek yang diperhatikan Bappeda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu lingkungan strategis juga merupakan salah satu hal untuk penentuan isu strategis.

Dalam merumuskan isu strategis disamping berdasarkan tugas pokok dan fungsi juga memperhatikan analisa lingkungan, permasalahan yang dihadapi, Visi dan Misi Kepala Daerah, Renstra K/L serta RTRW dan KLHS, dengan demikian isu strategis dapat menjadi dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Dari hasil penelaahan diatas, maka dirumuskan Isu stretegis Bappeda Kabupaten Badung sebagai berikut :

A. Kondisi existing antara lain :

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan manajerial bidang perencanaan pembangunan;
2. Belum sempurnanya basis data pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan tahun berikutnya;
3. Belum optimalnya sistem koordinasi perencanaan pembangunan antara Provinsi, Kabupaten/Kota lain, swasta serta masyarakat.

B. Kondisi yang diharapkan adalah :

1. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan manajerial bidang perencanaan pembangunan;
2. Terbangunnya basis data yang mantap dan dapat diandalkan dalam perencanaan pembangunan;
3. Terwujudnya suatu sistem koordinasi perencanaan pembangunan antara Provinsi, Kabupaten/Kota lain, swasta serta masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran :

- 1) Meningkatkan kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Meningkatkan kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan

b. Tujuan :

Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.

Sasaran :

Meningkatnya peranserta *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan daerah.

c. Tujuan :

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Sasaran :

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

d. Tujuan :

Menurunnya angka kemiskinan.

Sasaran :

Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.

e. Tujuan :

Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas.

Sasaran :

Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Badung

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	a. Meningkatkan kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	95%	96%	97%	98%	99%
			b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	90%	91%	92%	93%	95%
		b. Meningkatkan kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	90%	92%	93%	94%	95%
			b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan	Indeks PMPRB Perangkat Daerah	-	-	21,94	22,05	22,50
2.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Meningkatnya peranserta <i>stakeholders</i> dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	85%	85%	90%	90%	90%
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	97%	97%	97%	98%	99%
4	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	85%	86%	87%	88%	90%
5	Terwujudnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	90%	91%	92%	93%	95%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Strategi :

- 1) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi.

b. Strategi :

Peningkatan pembangunan yang seimbang antar-wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar-sektor dan antar-wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat (berwawasan kondisi lokal masyarakat).

c. Strategi :

- 1) Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung.
- 2) Pembangunan yang seimbang antar-wilayah.
- 3) Peningkatan pengendalian pembangunan wilayah

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
- 2) Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan.
- 3) Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (*Green Infrastructure*).

d. Strategi :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia.

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Badung
Tahun 2016-2021

VISI : MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA			
MISI 3 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DENGAN MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah	1 Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah
	2 Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah		2 Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi.
	3 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintahan	Meningkatkan Disiplin Pegawai, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah, serta kinerja Perangkat Daerah
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	2 Peningkatan pembangunan yang seimbang antar-wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	1 Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar-sektor dan antar-wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan
			2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat (berwawasan kondisi lokal masyarakat)
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah		

MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia	Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial
MISI 8 : MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung. 2 Pembangunan yang seimbang antar-wilayah. 3 Peningkatan pengendalian pembangunan wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan 2 Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan 3 Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastructure).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan
- d. Meningkatnya peranserta *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan daerah.
- e. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- f. Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.
- g. Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan Serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda
Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta					
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	a. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				12.829,51		13.896,07		12.318,85		14.686,02		14.420,42		68.150,87	Bappeda	Kabupaten Badung			
			FUNGSI PERENCANAAN				12.829,51		13.896,07		12.318,85		14.686,02		14.420,42		68.150,87	Bappeda	Kabupaten Badung			
						a. Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah		95%	95%	96%	97%	98%	99%	99%								
						a. Persentase kesesuaian antara RPKD dengan RPJMD		95%	95%	96%	97%	98%	99%	99%								
					21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RPKD dengan RPJMD	100%	100%	887,01	100%	864,61	100%	748,57	100%	2.531,23	100%	2.647,68	100%	7.679,11	Bappeda	Kabupaten Badung
						Kegiatan :																
					08	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RPKD Kabupaten Badung	85 Buku	146 Buku	319,40	120 buku	262,05	146 Buku	181,95	85 Buku	1.791,41	85 Buku	1.791,41	730 buku	4.346,21	Bappeda	Kabupaten Badung
					24	Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	Rekapitulasi Usulan prioritas pembangunan Nasional dalam penyusunan RKP	1 kali	1 Dokumen	97,74	1 Dokumen	144,03		-	-	-	-	-	2 Dokumen	241,77	Bappeda	Kabupaten Badung
					'84	Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dengan Daerah dan Musrenbangnas	Rekapitulasi Usulan prioritas pembangunan Nasional dalam RKP	1 kali	-	-	-	-	1 Dokumen	181,45	1 Dokumen	260,56	1 Dokumen	186,84	3 Dokumen	628,84	Bappeda	Kabupaten Badung
					35	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Perubahan RPKD Kabupaten Badung	85 Buku	146 Buku	165,76	120 buku	154,60	146 Buku	81,29	80 Buku	60,61	146 Buku	104,74	730 buku	567,00	Bappeda	Kabupaten Badung
		41	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik	1 laporan	1 laporan	15,67	1 laporan	9,24	1 laporan	10,12	1 laporan	8,32	1 laporan	8,32	5 laporan	51,66	Bappeda	Kabupaten Badung			
		45	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	71,07	1 Jenis Dokumen	111,04	1 Jenis Dokumen	63,96	2 Jenis Dokumen	136,83	1 Jenis Dokumen	136,83	5 Jenis Dokumen	519,73	Bappeda	Kabupaten Badung			
		46	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	152,32	1 Jenis Dokumen	110,12	1 Jenis Dokumen	151,98	2 Jenis Dokumen	142,67	1 Jenis Dokumen	288,71	5 Jenis Dokumen	845,79	Bappeda	Kabupaten Badung			
		47	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	47,72	1 Jenis Dokumen	49,08	1 Jenis Dokumen	49,12	1 Jenis Dokumen	65,09	1 Jenis Dokumen	65,09	5 Jenis Dokumen	276,10	Bappeda	Kabupaten Badung			
		48	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	17,33	1 Jenis Dokumen	24,45	1 Jenis Dokumen	28,70	1 Jenis Dokumen	65,76	1 Jenis Dokumen	65,76	5 Jenis Dokumen	201,99	Bappeda	Kabupaten Badung			
				b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang		80%																
		27	Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	14,55%	16,36%	491,44	20,00%	1.053,44	23,64%	403,92	27,27%	12,44	30,91%	12,44	30,91%	1.973,67	Bappeda	Kabupaten Badung			

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Kegiatan :																	
			01 Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung melalui BKPRD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah	1 paket	1 paket	241,44					-	-			1 paket	241,44	Bappeda	Kabupaten Badung	
			06 Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kabupaten Badung	jumlah Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kabupaten	1 paket	1 kajian	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kajian	250,00	Bappeda	Kabupaten Badung	
			01 Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	data tidak tersedia	-	-	1 Jenis Dokumen	152,69	-	-	-	-	-	-	4 Jenis Dokumen	152,69	Bappeda	Kabupaten Badung	
			03 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	data tidak tersedia	-	-	1 laporan	87,96	1 laporan	3,92	1 laporan	12,44	1 laporan	12,44	1 laporan	116,75	Bappeda	Kabupaten Badung	
			04 Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di	data tidak tersedia	-	-	1 paket	812,79	1 paket	400,00	-	-	-	-	1 paket	1.212,79	Bappeda	Kabupaten Badung	
	b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah			a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	90%	90%	91%	92%	93%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%			
				b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			07 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Kegiatan :	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKP	100%	100%	183,13	100%	9,27	100%	133,20	100%	18,84	100%	18,84	100%	363,28	Bappeda	Kabupaten Badung	
			01 Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	10,12	3 Jenis Dokumen	9,27	3 Jenis	13,25	4 Jenis	18,84	3 Jenis	18,84	3 Jenis	70,32	Bappeda	Kabupaten Badung	
			9 Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021	Jumlah dokumen perubahan rencana strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Badung	data tidak tersedia	38 Dokumen	173,01	-	-	38 Dokumen	119,95	-	-	-	-	38 Dokumen	292,96	Bappeda	Kabupaten Badung	
			xx Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	Jumlah dokumen rencana strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Badung	data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 Dokumen	-	Bappeda	Kabupaten Badung	
			21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan :	Persentase kesesuaian antara RKP dengan RPJMD	100%	100%	3.014,64	100%	2.583,82	100%	2.256,11	100%	2.181,63	100%	2.436,39	100%	12.472,59	Bappeda	Kabupaten Badung	
			42 Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD yang telah dibahas	53 set	38 paket dokumen	188,12	38 paket dokumen	119,55	38 paket dokumen	104,68	38 set dokumen	83,10	38 paket dokumen	220,06	190 paket dokumen	715,51	Bappeda	Kabupaten Badung	
			43 Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah APBD yang telah dibahas	53 set	38 paket dokumen	361,08	38 paket dokumen	327,09	38 paket dokumen	246,99	38 set dokumen	210,49	38 paket dokumen	318,84	190 paket dokumen	1.464,49	Bappeda	Kabupaten Badung	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta					
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	c. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan		64	Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah hasil verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	data tidak tersedia	2 Laporan	2.465,45	2 Laporan	2.137,17	2 Laporan	1.904,44	38 Perangkat Daerah	1.888,04	38 Dokumen Renja Perangkat Daerah	1.897,49	10 Laporan	10.292,59	Bappeda	Kabupaten Badung		
				Indeks PMPRB Perangkat Daerah	data tidak tersedia	-	-	-	21,94	-	-	22,05	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	Bappeda	Kabupaten Badung		
			01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	75%	100%	1.979,16	100%	2.021,07	100%	1.454,78	100%	1.348,79	100%	1.348,79	100%	1.348,79	100%	8.152,60	Bappeda	Kabupaten Badung
					Kegiatan :																	
			01	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah benda Pos	3 jenis benda pos	3 jenis benda pos	8,22	3 jenis benda pos	8,22	3 jenis benda pos	12,59	3 jenis benda pos	8,59	3 jenis benda pos	8,59	3 jenis benda pos	8,59	3 jenis benda pos	46,21	Bappeda	Kabupaten Badung
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, listrik, air dan telepon kantor	2 jenis jasa komunikasi	2 jenis jasa komunikasi	426,79	2 jenis jasa komunikasi	426,79	2 jenis jasa komunikasi	398,52	2 jenis jasa komunikasi	318,00	2 jenis jasa komunikasi	318,00	2 jenis jasa komunikasi	318,00	2 jenis jasa komunikasi	1.888,10	Bappeda	Kabupaten Badung
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	37 Unit	36 Unit	21,10	36 Unit	18,10	36 Unit	18,10	35 Unit	22,00	36 Unit	22,00	36 Unit	22,00	36 Unit	101,30	Bappeda	Kabupaten Badung
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	28 jenis alat tulis kantor	28 jenis alat tulis kantor	39,82	28 jenis alat tulis kantor	44,86	28 jenis alat tulis kantor	59,38	28 jenis alat tulis kantor	58,30	28 jenis alat tulis kantor	58,30	28 jenis alat tulis kantor	58,30	28 jenis alat tulis kantor	260,67	Bappeda	Kabupaten Badung
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetak dan biaya penggandaan	35 jenis cetakan	35 jenis cetakan	104,40	35 jenis cetakan	119,36	35 jenis cetakan	99,57	35 jenis cetakan	110,43	35 jenis cetakan	110,43	35 jenis cetakan	110,43	35 jenis cetakan	544,19	Bappeda	Kabupaten Badung
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	15,86	1 paket	15,17	1 paket	15,68	8 Jenis Komponen	15,12	1 paket	15,12	1 paket	15,12	1 paket	76,96	Bappeda	Kabupaten Badung
			14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga kantor	11 jenis alat RT	11 jenis alat RT	5,78	11 jenis alat RT	14,97	11 jenis alat RT	15,58	11 jenis alat RT	14,91	11 jenis alat RT	14,91	11 jenis alat RT	14,91	11 jenis alat RT	66,15	Bappeda	Kabupaten Badung
			15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan majalah	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	10 Jenis Surat Kabar/Majalah	70,83	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	79,11	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	79,11	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	79,53	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	79,53	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	79,53	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	388,11	Bappeda	Kabupaten Badung
			17	Penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	Jumlah makanan dan minuman pegawai dan tamu	9 jenis konsumsi	9 jenis konsumsi	33,00	9 jenis konsumsi	59,48	9 jenis konsumsi	22,50	9 jenis konsumsi	11,25	9 jenis konsumsi	11,25	9 jenis konsumsi	11,25	9 jenis konsumsi	137,48	Bappeda	Kabupaten Badung
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan Koordinasi dan konsultasi Keluar daerah	1 Paket	1 Paket	600,00	1 Paket	600,00	1 Paket	361,25	1 Ls	225,00	1 Paket	225,00	1 Paket	225,00	1 Paket	2.011,25	Bappeda	Kabupaten Badung
			19	Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah	Jumlah bahan/sarana lomba raga dan kesenian	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	17,50	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	53,50	-	-	-	-	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	-	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	-	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	71,00	Bappeda	Kabupaten Badung
		24	Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan	Jumlah bahan upakara keagamaan	13 jenis sarana upakara	13 jenis sarana upakara	28,85	13 jenis sarana upakara	31,40	13 jenis sarana upakara	31,40	13 jenis sarana upakara	32,17	13 jenis sarana upakara	32,17	13 jenis sarana upakara	32,17	13 jenis sarana upakara	155,99	Bappeda	Kabupaten Badung	
		25	Pelaksanaan Upakara Pengantaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jaqat	Tersedianya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi	2 pura	2 pura	40,00	2 pura	131,50	-	-	2 pura	131,50	2 pura	131,50	2 pura	131,50	2 pura	434,50	Bappeda	Kabupaten Badung	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			26	Penyediaan bahan dekorasi	Jumlah bahan sarana dekorasi	data tidak tersedia	-	-	6 jenis bahan dekorasi	34.50	59.60	2 Jenis Bahan Dekorasi	40.37	6 jenis bahan dekorasi	40.37	6 jenis bahan dekorasi	174.83	Bappeda	Kabupaten Badung	
			27	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia	30084 Liter	32181 Liter	337.49	34920 Liter	384.12	34920 Liter	281.51	24060 Liter	281.61	34920 Liter	281.61	167436 liter	1.566.34	Bappeda	Kabupaten Badung
			28	Pencelanaan Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor	data tidak tersedia	1 paket	229.52	-	-	-	-	-	1 paket	229.52	-	-	229.52	Bappeda	Kabupaten Badung
			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	100%	1.116,52	100%	1.446,89	100%	303,16	100%	402,21	100%	361,35	100%	3.630,13	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :																
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	data tidak tersedia	1 unit	19.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	19.50	Bappeda	Kabupaten Badung
			7	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor	data tidak tersedia	9 jenis perlengkapan kantor	105.64	4 jenis perlengkapan kantor	201.40	-	-	-	-	-	-	9 jenis perlengkapan kantor	307.04	Bappeda	Kabupaten Badung
			09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	11 jenis peralatan kantor	11 jenis peralatan kantor	615.00	11 jenis peralatan kantor	678.79	-	-	-	-	-	-	11 jenis peralatan kantor	1.293.79	Bappeda	Kabupaten Badung
			10	Pengadaan Interior Kantor dan Meubelair	Jumlah Pengadaan Interior Kantor dan Meubelair	data tidak tersedia	1 paket	196.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	196.50	Bappeda	Kabupaten Badung
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor	3 jenis komponen gedung	3 jenis komponen gedung	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	3 jenis komponen gedung	3.50	Bappeda	Kabupaten Badung
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	37 Unit	37 Unit	141.63	35 Unit	150.09	35 Unit	164.40	35 Unit	265.13	35 Unit	224.28	37 Unit	945.52	Bappeda	Kabupaten Badung
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara	7 jenis pemeliharaan	7 jenis pemeliharaan	114.50	4 jenis pemeliharaan	95.36	4 jenis pemeliharaan	31.06	4 jenis pemeliharaan	41.00	4 jenis pemeliharaan	41.00	7 jenis pemeliharaan	322.93	Bappeda	Kabupaten Badung
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan kantor	2 jenis pemeliharaan	2 jenis pemeliharaan	79.75	2 jenis pemeliharaan	79.75	2 jenis pemeliharaan	79.75	2 jenis pemeliharaan	61.08	2 jenis pemeliharaan	61.08	2 jenis pemeliharaan	361.40	Bappeda	Kabupaten Badung
			29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah Peralatan meubelair	4 jenis meubelair	4 jenis meubelair	25.00	4 jenis meubelair	25.00	4 jenis meubelair	13.55	4 Jenis pemeliharaan	25.00	4 jenis meubelair	25.00	4 jenis meubelair	113.55	Bappeda	Kabupaten Badung
			46	Pemeliharaan Tanaman Hias	Jumlah Tanaman Hias yang dipelihara	10 jenis tanaman	10 jenis tanaman	12.00	10 jenis tanaman	20.00	10 jenis tanaman	14.40	10 jenis tanaman hias	10.00	10 jenis tanaman	10.00	10 jenis tanaman	66.40	Bappeda	Kabupaten Badung
			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan	1 Laporan	485,52	1 Laporan	704,41	1 Laporan	608,60	1 Laporan	823,28	1 Laporan	750,67	1 Laporan	3.372,48	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :																
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Honorarium Kegiatan	29 Orang	29 Orang	479.74	29 Orang	617.66	29 Orang	506.90	39 Orang	658.31	29 Orang	637.44	145 Orang	2.900.05	Bappeda	Kabupaten Badung
			02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda yang disusun	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	5.78	4 Jenis Dokumen	86.76	4 Jenis Dokumen	101.71	4 Jenis Dokumen	164.97	4 Jenis Dokumen	113.22	20 Jenis Dokumen	472.44	Bappeda	Kabupaten Badung
			05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencana Pembangunan Daerah	data tidak tersedia	54 orang	595,81	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	595,81	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :																

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah		Pelatihan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pusat	Jumlah Aparat Perencanaan Pembangunan yang mendapat bimtek	data tidak tersedia	1 Paket	595,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	595,81	Bappeda	Kabupaten Badung	
				Persentase usulan kegiatan yang diserap dalam RKP																	
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKP dengan RPJMD	100%	100%	349,70	100%	329,25	100%	380,60	100%	603,33	100%	679,52	100%	2.342,40	Bappeda	Kabupaten Badung		
				Kegiatan :																	
		09	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Buku Berita Acara RKP Kabupaten Badung	120 Buku	146 Buku	200,98	120 buku	120,21	146 Buku	181,42	85 Buku	285,12	120 Buku	329,25	730 buku	1.116,98	Bappeda	Kabupaten Badung		
		19	Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan	Jumlah Buku Berita Acara Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan	300 buku	600 buku	45,95	600 buku	54,24	600 buku	27,33	300 buku	204,91	300 buku	204,91	3000 buku	537,34	Bappeda	Kabupaten Badung		
		26	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Buku Berita Acara Kespakatan Forum Perangkat Daerah	80 Buku	80 Buku	102,77	80 Buku	154,79	80 Buku	171,85	80 Buku	113,30	80 Buku	145,36	400 buku	688,08	Bappeda	Kabupaten Badung		
					Persentase capaian kinerja pembangunan daerah																
		15	Program Pengembangan Data/informasi	Tersedianya Data dan Informasi yang Memadai	1 paket	1 paket	418,30	1 paket	125,69	1 paket	88,69	1 paket	68,65	1 paket	68,65	1 paket	769,97	Bappeda	Kabupaten Badung		
				Kegiatan :																	
		05	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Buku Profil Kabupaten Badung Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	100 buku	100 buku	150,82	-	-	-	-	-	-	-	100 buku	150,82	Bappeda	Kabupaten Badung			
		43	Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	200 buku	100 buku	135,33	-	-	-	-	-	-	-	100 buku	135,33	Bappeda	Kabupaten Badung			
		44	Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah laporan data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	data tidak tersedia	1 laporan	132,15	1 laporan	125,69	-	-	1 paket	68,65	1 laporan	68,65	5 laporan	395,14	Bappeda	Kabupaten Badung		

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			48	Pengembangan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah	data tidak tersedia					1 Paket	88,69	-	-	-	3 Paket	88,69	Bappeda	Kabupaten Badung	
			21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	2.078,95	100%	1.522,89	100%	3.622,58	100%	3.834,67	100%	3.143,58	100%	14.202,67	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :																
			02	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Daerah	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	data tidak tersedia						125 buku	174,89		174,89	140 Buku	349,78	Bappeda	Kabupaten Badung	
			12	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	50 buku	50 buku	22,61	50 buku	12,20	50 buku	16,07	50 buku	15,38	50 buku	15,38	250 buku	81,63	Bappeda	Kabupaten Badung
			62	Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	data tidak tersedia	1 jenis Dokumen	500,62	-	-	1 jenis Dokumen	2.035,60	-	-	-	-	2 jenis Dokumen	2.536,22	Bappeda	Kabupaten Badung
			39	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	200 buku	125 buku	220,77	125 buku	237,82	125 buku	831,18	125 buku	1.036,39	125 buku	1.036,39	625 buku	3.362,56	Bappeda	Kabupaten Badung
			44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung	1 paket	-	4 jenis dokumen	54,36	-	-	-	-	-	4 jenis dokumen	-	16 jenis dokumen	54,36	Bappeda	Kabupaten Badung
			51	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	7 SKPD	4 kali/tahun	150,06	4 kali/tahun	132,13	-	-	4 kali/tahun	46,74	5 buku	46,74	20 kali/tahun	375,67	Bappeda	Kabupaten Badung
			52	Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RKPD Kabupaten Badung	50 buku	200 buku	153,04	200 buku	221,21	300 buku	188,95	4 Jenis Dokumen	264,59	300 buku	202,76	1300 buku	1.030,55	Bappeda	Kabupaten Badung
			53	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan hasil Monitoring Penggunaan Dana APBN di Kab. Badung	80 buku	80 buku	81,91	80 buku	145,61	-	-	-	-	-	-	160 buku	227,52	Bappeda	Kabupaten Badung
			54	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan Realisasi Dana APBN dan Buku Hasil Monitoring Dana APBN	data tidak tersedia					80 buku	50,14	100 Buku	109,46	120 buku	105,11	200 buku	264,71	Bappeda	Kabupaten Badung
			61	Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	Jumlah Dokumen Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	data tidak tersedia	1 Jenis Dokumen	141,38	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Jenis Dokumen	141,38	Bappeda	Kabupaten Badung
			31	Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	data tidak tersedia	5 buku laporan	12,36	5 buku laporan	7,12							10 buku laporan	19,47	Bappeda	Kabupaten Badung
			86	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM	Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	data tidak tersedia					5 buku laporan	50,25	-	-	5 buku laporan	-	15 buku laporan	50,25	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			65	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen hasil evaluasi perencanaan (Renja dan RKPD)	data tidak tersedia	2 Jenis Dokumen	22,31			-	-					2 Jenis Dokumen	22,31	Bappeda	Kabupaten Badung
			69	Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	Laporan hasil Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	data tidak tersedia	1 Laporan	45,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	45,30	Bappeda	Kabupaten Badung
			70	Pembuatan Info Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil Pembangunan Sistem Informasi Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	data tidak tersedia	1 Laporan	196,85	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	196,85	Bappeda	Kabupaten Badung
			71	Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	Laporan hasil Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	data tidak tersedia	1 Laporan	40,29	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	40,29	Bappeda	Kabupaten Badung
			72	SIMDA Terintegrasi	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	data tidak tersedia	-	-	1 Laporan	506,87	38 perangkat daerah	314,16	49 Perangkat Daerah	584,04	49 Perangkat Daerah	509,04	1 Laporan	1.914,13	Bappeda	Kabupaten Badung
			74	Rapat Koordinasi Teknis Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Teknis Penyelarasan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	data tidak tersedia	-	-	4 kali/tahun	93,58	-	-	-	-	-	-	16 kali/tahun	93,58	Bappeda	Kabupaten Badung
			77	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	data tidak tersedia	-	-	1 Laporan	10,76	-	-	5 Laporan	132,89	-	86,30	4 Laporan	229,95	Bappeda	Kabupaten Badung
			78	Pengelola Teknis dan Pemutahiran SIPD	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	data tidak tersedia	-	-	1 Laporan	64,74	1 Laporan	71,94	49 Perangkat Daerah	552,85	49 Perangkat Daerah	84,05	1 Laporan	773,58	Bappeda	Kabupaten Badung
			83	Workshop SIMDA Terintegrasi	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	data tidak tersedia	1 Laporan	275,38	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	275,38	Bappeda	Kabupaten Badung
			87	Update Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Update Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	data tidak tersedia	1 Aplikasi	216,08	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	216,08	Bappeda	Kabupaten Badung
			79	Monitoring dan Evaluasi dibawah Bidang Sosial dan Budaya	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi dibawah Bidang Sosial dan Budaya	data tidak tersedia			2 Laporan	36,49	-	-	5 buku	39,70	2 Laporan	39,70	10 Laporan	115,89	Bappeda	Kabupaten Badung
			80	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	125 buku	360,63	-	326,12	1 jenis Dokumen	686,76	Bappeda	Kabupaten Badung
			81	Penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2020 - 2024	Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jenis Dokumen	-	Bappeda	Kabupaten Badung
			82	Penyusunan Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung	data tidak tersedia					1 Dokumen	7,03	1 Dokumen	517,10	1 Dokumen	517,10	1 Dokumen	1.041,23	Bappeda	Kabupaten Badung
			88	Penyusunan Analisis Standar Biaya	Jumlah dokumen Analisis Standar Biaya	data tidak tersedia					1 paket	57,27	-	-	-	-	1 Paket	57,27	Bappeda	Kabupaten Badung
			22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tertindakannya perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam	6 Kecamatan	6 Kecamatan	247,04	6 Kecamatan	402,14	6 Kecamatan	115,64	6 Kecamatan	218,99	6 Kecamatan	146,40	6 Kecamatan	1.130,21	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :																

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta					
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
4	Menurunnya angka kemiskinan		04	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikoordinasikan Program dan Keegiatannya	5 SKPD/ 2 bagian	9 PD & 3 Bagian	107,08	8 PD & 3 Bagian	198,36	9 PD & 3 Bagian	70,77	9 PD & 3 Bagian	98,39	9 PD & 3 Bagian	77,96	9 PD & 3 Bagian	552,56	Bappeda	Kabupaten Badung		
			17	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pertanian dan Sumber Daya Alam	data tidak tersedia	3 Perangkat Daerah	73,69	3 Perangkat Daerah	129,59	3 Perangkat Daerah	40,33	3 Perangkat Daerah	8,45	3 Perangkat Daerah	9,65	3 Perangkat Daerah	261,71	Bappeda	Kabupaten Badung		
			18	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah Perangkat Daerah yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pengembangan Dunia Usaha	data tidak tersedia	2 Perangkat Daerah	66,27	2 Perangkat Daerah	74,19	2 Perangkat Daerah	4,54	2 Perangkat Daerah	9,22	2 Perangkat Daerah	10,04	2 Perangkat Daerah	164,25	Bappeda	Kabupaten Badung		
			19	Penyusunan Usulan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)	usulan-usulan perangkat daerah yang mendapat dana TP dan DAK	data tidak tersedia							38 Perangkat Daerah	102,94	38 Perangkat Daerah	48,75	38 Perangkat Daerah	151,69	Bappeda	Kabupaten Badung		
			24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	597,38	1 Dokumen	16,71	1 Dokumen	28,75	1 Dokumen	286,09	1 Dokumen	928,93	Bappeda	Kabupaten Badung		
			Kegiatan :																			
			04	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Buku Laporan hasil monitoring dan evaluasi	data tidak tersedia	-	10 buku	41,40	10 buku	10,91	5 buku	14,08	10 buku	14,08	10 buku	80,47	Bappeda	Kabupaten Badung			
			06	Penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	Laporan permuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	data tidak tersedia	-	-	60,71	-	-	-	-	1 Paket	60,71	Bappeda	Kabupaten Badung					
			07	Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	data tidak tersedia	10 buku	26,97	10 buku	5,80	5 laporan	14,67	10 buku	14,67	40 buku	62,12	Bappeda	Kabupaten Badung				
			06	Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Badung	Laporan Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	data tidak tersedia	1 paket	468,30	-	-	-	-	1 paket	468,30	Bappeda	Kabupaten Badung						
			08	Penyusunan Rencana Induk Sanitasi Di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen rencana induk sanitasi Kabupaten Badung	data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	1 paket	-	Bappeda	Kabupaten Badung						
			09	Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Badung	data tidak tersedia	-	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	Bappeda	Kabupaten Badung						
			10	Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	data tidak tersedia	-	-	1 dokumen	257,33	1 dokumen	257,33	Bappeda	Kabupaten Badung								
				- Persentase Penduduk Miskin	data tidak tersedia	85%	86%	87%	88%	90%	90%											
				- Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan																		
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	678,66	100%	1.762,30	100%	1.926,41	100%	2.257,61	100%	2.211,01	100%	8.835,99	Bappeda	Kabupaten Badung					
Kegiatan :																						
33	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	data tidak tersedia	4kali/tahun	126,42	4kali/tahun	1.571,47	4kali/tahun	1.926,41	3 kali/tahun	2.257,61	4kali/tahun	2.211,01	4kali/tahun	8.092,91	Bappeda	Kabupaten Badung					

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta					
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
5	Terwujudnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas		Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	65	Pembangunan Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	Aplikasi Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	data tidak tersedia	1 Aplikasi	552,25	-	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	552,25	Bappeda	Kabupaten Badung		
				76	Pemantapan, Pemutahiran dan Pengolahan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	Laporan Study Komparasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan/ Perlindungan Sosial	data tidak tersedia	-	-	1 Laporan	190,84	-	-	-	20 buku	-	4 Laporan	190,84	Bappeda	Kabupaten Badung		
							- Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	data tidak tersedia	90%	91%	92%	93%	95%	95%								
							- Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	data tidak tersedia	90%	91%	92%	93%	95%	95%								
				24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	1 Dokumen	303,64	1 Dokumen	301,42	1 Dokumen	68,67	1 Dokumen	134,77	1 Dokumen	134,77	1 Dokumen	943,27	Bappeda	Kabupaten Badung	
				01	Kegiatan : Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan pembangunan wilayah	3 kali/tahun	132,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kali/tahun	132,18	Bappeda	Kabupaten	
				02	Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	data tidak tersedia	3 kali/tahun	94,12	4 kali/tahun	164,78	-	-	-	-	-	-	19 kali/tahun	258,91	Bappeda	Kabupaten Badung	
				05	Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah	data tidak tersedia	4kali/tahun	77,33	4kali/tahun	136,64	4kali/tahun	68,67	1 paket	134,77	4kali/tahun	134,77	20kali/tahun	552,18	Bappeda	Kabupaten Badung	
27	Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	14,55%	20,00%	171,49	23,64%	191,20	27,27%	220,83	30,91%	174,23	30,91%	757,76	Bappeda	Kabupaten Badung							
02	Kegiatan : Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	data tidak tersedia	-	-	4 kali/tahun	171,49	4 kali/tahun	191,20	1 tahun	220,83	4 kali/tahun	174,23	4 kali/tahun	757,76	Bappeda	Kabupaten Badung					

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2016
Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
					Target	Rp. Juta							
1	2	4	5	6	7	8	9	10					
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	a. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	1 paket	940,37	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung					
				a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD									
				Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD									
			Kegiatan :										
			08	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah					Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung	160 Buku	376,72	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			24	Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP					Usulan program / kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Badung yang dibiayai APBN	1 kali	48,23	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			35	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016					Buku Perubahan RKPD Kabupaten Badung	160 Buku	128,28	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
41	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Dokumen Laporan Forum Konsultasi Publik	1 laporan	14,52	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung							
45	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum APBD	165 buku	115,66	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung							
46	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	165 buku	173,96	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung							

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
					Target	Rp. Juta			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
			47	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	165 buku	37,87	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			48	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD	165 buku	45,14	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD	1 paket	1.037,17	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
				Kegiatan :					
			01	Pelayanan jasa administrasi keuangan		3 jenis benda pos	8,22	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		2 jenis jasa komunikasi	62,00	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		37 Unit	18,80	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			10	Penyediaan alat tulis kantor		28 jenis alat tulis kantor	32,07	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		35 jenis cetakan	130,29	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 paket	6,51	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			14	Penyediaan peralatan rumah tangga		11 jenis alat RT	14,28	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		10 Jenis Surat Kabar/Majalah	59,74	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
					Target	Rp. Juta			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
			17	Penyediaan makanan dan minuman		9 jenis konsumsi	25,99	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 Paket	250,00	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			19	Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah		2 jenis lomba (olahraga dan seni)	14,97	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			24	Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan		13 jenis sarana upakara	34,85	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			25	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura- Pura Kahyangan Jaqat		2 pura	40,00	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			27	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan		30084 Liter	339,46	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	1.106,62		Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Unit	230,00	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		9 jenis perlengkapn kantor	345,41	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			10	Pengadaan Interior Kantor dan Meubelair		1 paket	201,79	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		3 jenis komponen gedung	2,50	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		37 Unit	182,63	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor		7 jenis pemeliharaan	77,30	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			28	Pemeliharaan peralatan kantor		2 jenis pemeliharaan	30,00	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Target	Rp. Juta		
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		4 jenis pemeliharaan	25,00	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
		46	Pemeliharaan Tanaman Hias		10 jenis tanaman	12,00	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	355,98	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			Kegiatan :					
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		29 Orang	351,04	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
		03	Survey Kepuasan Masyarakat		12 Bulan	4,94	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	6,25	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			Kegiatan :					
		02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah		30 buku	6,25	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
		18	Program Perencanaan Tata Ruang	b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	Tersedianya rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan	438,60	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			Kegiatan :					
		56	Penyusunan Naskah Akademis Raperda RDTR Desa Wisata di Kabupaten Badung		1 paket	192,30	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
					Target	Rp. Juta				
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
	b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah		57	Penyusunan Naskah Akademis Raperda RTBL Kawasan Pantai Pandawa Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan		1 Paket	115,80	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
			58	Penyusunan Naskah Akademis Raperda Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu		1 Paket	130,50	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
			09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	1 paket	31,32	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
				Kegiatan :						
				01	Penyusunan Dokumen Rencana SKPD		3 paket	9,65	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
				02	Verifikasi Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021		1 paket	21,67	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	1 paket	479,81	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
				Kegiatan :						
				42	Penelitian RKA SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2016		53 set	171,72	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
				43	Penelitian RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2017		53 set	308,09	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Target	Rp. Juta		
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Meningkatnya peranserta <i>stakeholders</i> dalam <i>perencanaan pembangunan</i> daerah	18	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan		875,75	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			Kegiatan :					
		29	Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Penataan Ruang di Kab. Badung melalui BKPRD		1 paket	375,75	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
		55	Ortorektifikasi Peta Dasar Pendukung RDTR Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang		1 paket	500,00	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
		21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	1 paket	424,96	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			Kegiatan :					
		09	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung		160 Buku	271,09	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
		19	Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan		600 buku	34,04	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
		26	Penyelenggaraan Forum SKPD		80 Buku	119,84	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
					Target	Rp. Juta						
1	2	4	5	6	7	8	9	10				
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	15	Program Pengembangan Data/informasi	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah	1 paket	963,98	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung				
				a. Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas								
				b. Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas								
				Tersedianya data dan informasi yang valid								
			05	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung					100 buku	98,97	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			43	Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung					1 paket	125,33	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			44	Pembangunan sistem informasi data perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung						349,28	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			45	Pembuatan Dokumentasi Visual RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021						199,60	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			46	Pembuatan Dokumentasi Visual Profil dan Potensi Daerah						190,80	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
			21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	1 paket	2.137,36	Bappeda Litbang
	Kegiatan :											
12	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung		22,61	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung							
29	Penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021		1.151,56	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung							
33	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanqqulangan Kemiskinan Daerah		132,27	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung							

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
					Target	Rp. Juta				
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
			39	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		200 buku	225,47	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
			51	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial		7 SKPD	129,70	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
			52	Evaluasi dan Pengendalian Dokumen RKPD Kabupaten Badung		200 buku	141,35	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
			53	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung		80 buku	81,91	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
			56	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang statistik, monitoring dan evaluasi		750 buku	146,65	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
			58	Pemutakhiran Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1 Paket	59,46	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
			60	Pemutakhiran e-Musrenbang		1 Paket	46,37	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
		22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi	6 Kecamatan	394,47		Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
			Kegiatan :							
			04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		5 SKPD/ 2 bagian	11,61	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
			15	Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah		2 kali	360,21	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
			17	Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Produksi Pertanian		6 kali	12,47	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	
			18	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha di Kabupaten Badung			10,17	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Target	Rp. Juta		
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	145,24	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung
		01	Kegiatan : Koordinasi perencanaan sarana prasarana wilayah		1 Paket	145,24	Bappeda Litbang	Kabupaten Badung

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	95%	95%	96%	97%	98%	99%	99%
2	Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	80%	90%	91%	92%	93%	95%	95%
3	Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	90%	90%	92%	93%	94%	95%	95%
4	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Indeks PMPRB Perangkat Daerah	data tidak tersedia	-	-	21,94	22,05	22,50	22,50
6	Persentase kehadiran <i>stakeholders</i> dalam Musrenbang	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%
7	Persentase program yang capaian kerjanya 100% keatas	97%	97%	97%	97%	98%	99%	99%
8	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	data tidak tersedia	85%	86%	87%	88%	90%	90%
9	Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	data tidak tersedia	90%	91%	92%	93%	95%	95%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda untuk menuntaskan target sesuai dengan periode 2016-2021. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Kedua Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Perubahan Kedua Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada Perubahan Kedua RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Perubahan Kedua Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.


BUPATI BADUNG,
NYOMAN GIRI PRASTA